



SALINAN

# WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
23. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2016;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.840.182.236.884,- mengalami penambahan sebesar Rp.20.689.485.930,- Sehingga setelah perubahan menjadi Rp.860.871.722.814,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp. 826.167.441.690,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp. <u>(5.621.650.365,00)</u>
Jumlah Pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 820.545.791.325,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 840.182.236.884,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp. <u>20.689.485.930,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 860.871.722.814,00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (40,325.931.489,00)
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1. Semula	Rp. 14.014.795.194,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 26.311.136.295,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 40.325.931.489,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 40.325.931.489,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	Rp. 0.00

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1. Semula	Rp. 33.736.743.410,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 7.925.500.000,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 41.662.243.410,00
b. Dana Perimbangan	
1. Semula	Rp. 749.594.278.280,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (13.547.150.365,00)</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp. 736.047.127.915,00
c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1. Semula	Rp. 42.836.420.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 42.836.420.000,00

2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hasil Pajak Daerah	
1. Semula	Rp. 5.870.000.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah hasil pajak daerah setelah perubahan	Rp. 5.870.000.000,00

b. Hasil Retribusi Daerah		
1. Semula	Rp.	18.421.742.310,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>7.925.500.000,00</u>
Jumlah hasil retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	26.347.242.310,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1. Semula	Rp.	840.000.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	840.000.000,00
d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1. Semula	Rp.	8.605.001.100,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	8.605.001.100,00

3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak		
1. Semula	Rp.	30.500.000.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(12.171.105.086,00)</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak setelah perubahan	Rp.	18.328.894.914,00
b. Dana Alokasi Umum		
1. Semula	Rp.	554.976.092.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.	554.976.092.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1. Semula	Rp.	164.118.186.280,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(1.376.045.279,00)</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.	162.742.141.001,00

4. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp.	0,00

b. Dana Darurat		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Bagi Hasil Pajak dari Propinsi		
1. Semula	Rp.	5.600.000.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak dari propinsi setelah perubahan	Rp.	5.600.000.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1. Semula	Rp.	37.236.420.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp.	37.236.420.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp.	0,00

### Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Belanja Tidak Langsung
 

1. Semula	Rp.	408.765.907.104,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>1.707.987.929,00</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.	410.473.895.033,00
  - b. Belanja Langsung
 

1. Semula	Rp.	431.416.329.780,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>18.981.498.001,00</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.	450.397.827.781,00
2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
  - a. Belanja Pegawai
 

1. Semula	Rp.	343.444.811.104,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>2.653.036.030,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	346.097.847.134,00

b. Belanja Bunga		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Belanja Subsidi		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.	0,00
d. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp.	3.210.000.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>1.023.000.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	4.233.000.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp.	575.000.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	575.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.	0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan		
1. Semula	Rp.	57.536.096.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	57.536.096.000,00
h. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp.	4,000,000,000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(1.968.048.101,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	2.031.951.899,00
3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp.	46.537.761.500,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(2.764.203.002,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	43.773.558.498,00

b. Belanja Barang dan Jasa	
1. Semula	Rp. 195.579.672.871,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 12.567.865.702,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 208.147.538.573,00
c. Belanja Modal	
1. Semula	Rp. 189.298.895.409,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 9.177.835.301,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 198.476.730.710,00

#### Pasal 4

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Sebelumnya	
1. Semula	Rp. 14.014.795.194,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 26.311.136.295,00</u>
Jumlah SiLPA tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp. 40.325.931.489,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah, dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 20 Oktober 2016

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 20 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

T t d

THAMRIN FABANYO

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2016 NOMOR 185.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2016.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



RIDWAN MUHAMMAD, SH, M.Si  
PEMBINA

NIP.19670202 200112 1 006